



**HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN STATUS
SOSIAL DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN
MAGELANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Non Formal**

**Oleh
RICH0 ANDRIANTO
NIM 1201415062**

**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 02 Februari 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd

NIP. 195609081983031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd

NIP. 196801211993032002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul berjudul “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Status Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang” telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

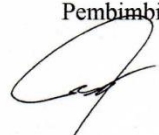
Ketua

Dr. Ahmad Rifa'i RC., M.Pd
NIP. 195908211984031001

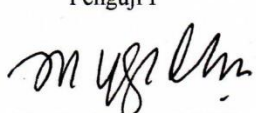
Sekretaris

Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd
NIP. 196801211993032002

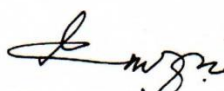
Pembimbing


Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd
NIP. 195609081983031003

Penguji I


Dr. Amin Yusuf, M.Si
NIP. 196408081991031003

Penguji II


Dra. Emmy Budiartati, M.Pd
NIP. 195601071986012001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang saya tulis di dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain terkecuali hanya sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah.

Semarang, 30 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Richo Andrianto

NIM. 1201415062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesuatu bisa mengubah kita, tapi kita mulai dan berakhir bersama keluarga.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tersayang, Bapak Anis Suharto dan Ibu Suprantini.
Terimakasih untuk doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan yang tak terbatas, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan.
2. Adikku tersayang, Ryan Oska yang selalu memberikan semangat.
3. Ratri Kurnia Airin yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan bantuan disaat susah.
4. Teman-teman seperjuangan PLS 2015
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Semarang dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Achmad Rifai Rc, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes yang telah memberikan kemudahan dalam segala bentuk perijinan.
2. Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Unnes, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
3. Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd, Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan banyak bimbingan kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Kepala Desa di Kecamatan Mertoyudan
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua, yang sudah membantu penulis dalam bentuk material maupun spiritual.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, khususnya pengembangan Pendidikan Luar Sekolah. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.

Semarang, Januari 2020



Richo Andrianto

NIM. 1201415062

ABSTRAK

Andrianto, Richo. 2019. *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Status Sosial dengan Partisipasi Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.* Prodi Pendidikan Non Formal, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Univertas Negeri Semarang.

Pembimbing : Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Status Sosial, Keluarga Berencana.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan dan status sosial. Melihat adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan status sosial, peneliti merasa perlu untuk meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dan status sosial dalam partisipasi program keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dan status sosial dengan partisipasi PUS dalam keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis korelasi ganda dengan metode penelitian kuesioner dan dokumentasi dengan pemilihan responden yang dilakukan secara acak kepada pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan diaplikasikan untuk meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dan status sosial dalam partisipasi program keluarga berencana. Jumlah responden sebanyak 641 orang ditentukan secara acak di Kecamatan Mertoyudan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Tingkat pendidikan pasangan usia subur Kecamatan Mertoyudan secara umum rendah yaitu dengan rata-rata tamatan sekolah menengah pertama. Pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan kebanyakan lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Status sosial PUS di Kecamatan Mertoyudan secara umum tergolong sedang. Pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan sebagian besar bekerja sebagai buruh sehingga pendapatan yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan rata-rata istrinya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai pendapatan tambahan yang lainnya. Tingkat partisipasi pasangan usia subur dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan secara umum sedang. Partisipasi PUS merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program keluarga berencana. Partisipasi pasangan usia subur rendah karena kurangnya informasi tentang KB dan banyak pasangan usia subur yang masih ingin menambah jumlah anak.

Simpulan dari penelitian ini adalah pasangan usia subur seharusnya lebih peduli terhadap pendidikan yang dimiliki dan lebih meningkatkan partisipasinya dalam program KB. Peningkatan partisipasi dapat membantu pemerintah dalam programnya untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk yang dimiliki Indonesia.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penegasan Istilah.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Partisipasi	12
2.1.1 Pengertian Partisipasi.....	12
2.1.2 Metode Partisipasi.....	13
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	14
2.1.4 Unsur-unsur Pokok Partisipasi.....	15
2.1.5 Bentuk-bentuk Partisipasi	17
2.2 Tingkat Pendidikan	18
2.2.1 Pengertian Pendidikan.....	18
2.2.2 Tujuan Pendidikan	19
2.2.3 Jalur Pendidikan.....	19

2.2.4	Jenjang Pendidikan	21
2.3	Status Sosial	23
2.3.1	Macam-macam Status Sosial	24
2.3.2	Pembagian Kelas Sosial	25
2.3.3	Aspek Status Sosial.....	27
2.4	Keluarga Bencana	29
2.4.1	Pengertian Keluarga Berencana	29
2.4.2	Ruang Lingkup Program KB	31
2.4.3	Organisasi KB di Indonesia	33
2.4.4	Tujuan Program KB	35
2.4.5	Sasaran Program KB.....	35
2.5	Kerangka Berpikir	36
2.6	Hipotesa Penelitian	38
BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Pendekatan Penelitian	39
3.2	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	39
3.3	Populasi Penelitian	39
3.4	Sampel Penelitian	40
3.5	Definisi Konseptual	42
3.5.1	Tingkat Pendidikan	42
3.5.2	Status Sosial	43
3.5.3	Partisipasi KB	44
3.7	Variabel Penelitian	46
3.7.1	Variabel bebas (X) / Variabel Independen.....	46
3.7.2	Variabel terikat (Y) / Variabel Dependen	46
3.8	Teknik Pengumpulan Data	46
3.8.1	Metode Kuesioner.....	46
3.8.2	Metode Dokumentasi	47
3.9	Instrumen Penelitian	47
3.10	Validitas dan Realibilitas	49
3.10.1	Validitas	49
3.10.2	Reliabilitas	51

3.11 Analisis Data	52
3.11.1 Analisis Deskriptif Presentase	52
3.11.2 Analisis korelasi ganda	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	56
4.1.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk.....	60
4.1.2 Sarana Pemerintah	65
4.1.3 Tingkat Pendidikan PUS Kecamatan Mertoyudan	66
4.1.4 Status Sosial PUS Kecamatan Mertoyudan	68
4.1.5 Level Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam Pelaksana Program KB di Kecamatan Mertoyudan	69
4.1.6 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Status Sosial dengan Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana	70
4.2 Pembahasan	71
4.2.2 Status Sosial PUS pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.....	73
4.2.3 Tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Pelaksana Program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan.....	75
4.2.4 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Status Sosial dalam Partisipasi PUS pada Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang77	
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	83
Saran dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian dapat dituliskan berikut :	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pendidikan PUS	10
Tabel 2 Pasangan Usia Subur dan Pasangan KB Aktif.....	35
Tabel 3 Sampel Penelitian.....	37
Tabel 4 Tingkat Pendidikan PUS di Kecamatan Mertoyudan	38
Tabel 5 Status Sosial PUS di Kecamatan Mertoyudan	38
Tabel 6 Indikator-Indikator Variabel Penelitian	40
Tabel 7 Banyak RT dan RW di Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019	43
Tabel 8 Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019.....	53
Tabel 9 Komposisi Penduduk Kecamatan Mertoyudan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	55
Tabel 10 Komposisi Penduduk Kecamatan Mertoyudan berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2019	57
Tabel 11 Komposisi Penduduk Kecamatan Mertoyudan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	58
Tabel 12 Jumlah dan Komposisi Penduduk berdasarkan Agama yang dianut	59
Tabel 13 Sarana Pendidikan Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019	60
Tabel 14 Sarana Kesehatan Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019	60
Tabel 15 Tingkat Pendidikan PUS Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019	61
Tabel 16 Tingkat Status Sosial PUS Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019.....	62
Tabel 17 Tingkat Partisipasi PUS Kecamatan Mertoyudan Tahun 2015	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 2 Peta Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Observasi	89
Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitisn	90
Lampiran 3: Surat Balikan dari Desa	91
Lampiran 4: Kisi-kisi Kuesioner	92
Lampiran 5: Kuesioner.....	95
Lampiran 6: Hasil Kuesioner	104
Lampiran 7: Hasil Dokumentasi	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara-negara yang ada di seluruh dunia memiliki masalah-masalah serupa yaitu masalah terkait dengan kependudukan. Jumlah penduduk di dunia pada saat ini semakin terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk yang dominan justru teridentifikasi pada penduduk dunia pada negara yang sedang berkembang. Penduduk di negara yang maju justru sedikit tingkat pertumbuhan penduduknya. Indonesia adalah negara yang berkembang yang memiliki masalah terkait jumlah penduduk. Menurut Dyah dan Sujiyanti (2011: 3) tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia meningkat dari angka 2,15% naik ke angka 2,49% setiap tahun. Negara Indonesia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada penduduk seperti kelahiran(fertilitas), kematian(mortalitas), dan perpindahan penduduk(migrasi). Faktor dasar yang digunakan modal untuk melakukan proses pembangunan di sebuah negara ialah penduduk. Namun jumlah penduduk pada sebuah negara yang terlalu banyak serta tingkat angka pertumbuhan yang tinggi akan menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembangunan di negara tersebut. Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk besar dan tingkat angka pertumbuhan yang tinggi membutuhkan metode untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan tersebut (Kuswati, 2007:11).

Pembangunan nasional di Indonesia sedang terhambat ditandai dengan permasalahan terkait kependudukan yang memiliki tingkat kualitas cukup rendah

(Prawirohardjo, 2007). Jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 252.164,8 menurut data yang dimiliki BPS pada tahun 2018. Nilai tingkat pertumbuhan jumlah penduduk berada pada angka 1,40 persen pertahun untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan data tersebut dapat diprediksi untuk total penduduk di Indonesia akan menyentuh angka 337 juta jiwa pada tahun 2054.

Proses pembangunan pada kualitas penduduk di Indonesia merupakan salah satu hal yang diberikan perhatian ekstra dalam kaitannya dengan pembangunan tingkat sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Perhatian ekstra yang diberikan pemerintah dapat dilihat pada program-program yang ada pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pembatasan jumlah penduduk merupakan salah satu program pemerintah yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah dalam pembatasan jumlah penduduk yang di fokuskan pada pasangan usia muda. Program KB mempunyai tujuan untuk mencegah kehamilan. Kehamilan yang tidak direncanakan serta kehamilan yang mempunyai risiko tinggi adalah prioritas dan fokus pemerintah pada program KB. Hal tersebut dijadikan fokus oleh pemerintah sebab kehamilan yang tidak direncanakan dan risiko tinggi cenderung menyebabkan serta meningkatkan tingkat angka kesakitan dan tingkat angka kematian ibu (BKKBN Jateng, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan Riskesdas (2013), 15 tahun sampai dengan 49 tahun merupakan usia reproduksi yang ada pada perempuan. Jumlah kelahiran haruslah diatur atau mengurangi jumlah kelahiran (Withers, 2010).

Wanita di prioritaskan untuk penggunaan alat kontrasepsi maupun keluarga berencana. Keberhasilan pencapaian untuk pelayanan pada program Keluarga Berencana merupakan salah satu tujuan pemerintah. Tingkat keberhasilan program Keluarga Berencana dapat diukur dengan cakupan peserta yang mengikuti Keluarga Berencana. Peserta yang mengikuti keluarga berencana dalam hal ini adalah peserta yang mengikuti Keluarga berencana atau pernah mengikuti program Keluarga Berencana, tempat pelayanan program Keluarga Berencana dan jenis-jenis kontrasepsi yang digunakan oleh peserta program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana memiliki dua jenis model untuk penggunaan alat yaitu Keluarga Berencana hormonal yang menggunakan susuk, suntikan dan pil serta Keluarga Berencana non hormonal yang menggunakan sterilisasi pria atau wanita, diafragma, spiral, dan kondom. Keluarga Berencana dengan jenis suntik merupakan jenis alat Keluarga Berencana yang dominan digunakan oleh para peserta program Keluarga Berencana di Indonesia.

Penduduk Kabupaten Magelang mengalami peningkatan jumlah penduduk 26.125 jiwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang memiliki 21 kecamatan dan terdapat 372 kelurahan/desa. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah yaitu 1.086 km². Kabupaten Magelang pada tahun 2017 memiliki jumlah pasangan usia subur yang aktif sejumlah 227.752 jiwa. Rincian penggunaan program Keluarga Berencana yang diikuti oleh pasangan usia subur di Kabupaten Magelang yaitu IUD 33.893 orang (18,67%), MOW 9.937 orang (5,47%), MOP 749 orang (0,41%), implant

24.815 orang (13,67%), kondom 4.150 orang (2,28%), suntik 87.279 orang (48,10%) dan pil 20.620 orang (11,36%) (BPS Kabupaten Magelang, 2019).

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan cikal bakal program Keluarga Berencana. PKBI berdiri pada tanggal 23 desember 1957 di Jakarta yang bergerak membantu masyarakat dengan bersifat sukarela. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dipelopori oleh PKBI dengan status sebagai badan pemerintahan. BKKBN memiliki tanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas dalam mengkoordinasi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terkait program keluarga bencana (BKKBN, 2011).

Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan UU No. 10 Tahun 1992 terkait Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yaitu upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga Berencana adalah sebuah program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga berhasil ataupun tidak program tergantung kepada semua partisipasi rakyat Indonesia, baik dari golongan atas, menengah maupun bawah, khusus untuk kesediaan dan kesadarannya setiap pasangan usia subur membatasi jumlah kelahiran (BKKBN, 2001).

Pendidikan menurut Ikhsan, Fuad (2005:5) adalah sebuah usaha secara sadar dalam pengembangan kepribadian manusia dan kemampuan yang ada di dalam dan luar sekolah serta prosesnya berlangsungnya selama hidup manusia. Proses

pendidikan pada manusia terjadi sepanjang hayat di dalam keluarga dan masyarakat serta tidak terjadi hanya di sekolah saja. Pendidikan tidak hanya sebuah usaha dalam pembentukan ketrampilan dan pemberian informasi. Pendidikan memiliki definisi yang lebih luas menjadi sebuah usaha dalam mewujudkan semua keinginan dan kebutuhan serta dalam kemampuan individu sehingga berdampak pada pola pribadi dan sosial (Ding, 2006).

Pendidikan terkait dengan kependudukan diperlukan yakni sesuai dengan hal terkait seperti kepadatan penduduk. Proses pendidikan terkait dengan kependudukan akan memberikan kepada anak didik sejumlah pengetahuan dasar terkait dengan problem pertumbuhan penduduk. Kesejahteraan yang meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sesuai akan memberikan dampak secara besar dan motivasi terkait dalam pembentukan sikap tingkah laku reproduktif. Pengembangan pendidikan terkait dengan kependudukan membuat orang memiliki keinginan keadaan dalam jumlah keluarga lebih kecil anggotanya (Kuswati, 2007:20).

Dalam masyarakat kedudukan seseorang bisa disebabkan dari beberapa hal. Tergantung bagaimana kebudayaan setempat. Namun secara umum kedudukan sosial atau status sosial dapat dilihat dari kekayaan, ekonomi, pendidikan dan keturunan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat akan mempengaruhi kegiatan dalam memenuhi hidupnya dan kedudukan ini mempengaruhi seseorang untuk menuntut ilmu. Adapun peranan status sosial dalam masyarakat menurut Suryani (1990 : 34) adalah dengan adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat memberikan kesempatan atau fasilitas hidup yang berbeda bagi masyarakat

seperti: keselamatan hidup, harta benda, standar hidup, kebebasan dan tingkah laku. Status seseorang akan berpengaruh pada peranan mereka yang berbeda dalam masyarakat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki status yang berbeda pula.

Angka rata-rata jumlah anak dilahirkan pada tingkat kelompok masyarakat miskin yakni 4,2 anak per keluarga. Angka rata-rata jumlah anak pada tingkat kelompok lebih mampu secara finansial yakni 3,0 anak per keluarga. Hasil dari (SDKI, 2007) Survei Demografis dan Kesehatan memberikan fakta bahwa perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah angka rata-rata pada jumlah anak yang dilahirkan berjumlah 4,1 anak per keluarga. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi angka rata-rata pada jumlah anak adalah 2,7 anak per keluarga.

Sebagian besar dari jumlah total penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar atau lebih rendah berdasarkan data demografi penduduk Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perilaku Keluarga Berencana dipengaruhi oleh perbedaan pengetahuan terkait Keluarga Berencana pada tingkat pendidikan rendah dan tinggi (BKKBN, 20011).

Berdasarkan berbagai pembahasan dan fakta yang dipaparkan sebelumnya, masih terdapat sejumlah pasangan usia subur kurang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam program Keluarga Berencana yang ada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Pertimbangan untuk pemilihan judul sebagai berikut pada Kecamatan Mertoyudan masih dijumpai tingkat kelahiran yang tinggi dikarenakan masih terdapat pasangan usia subur kurang sadar dalam mengikuti program Keluarga Berencana. Hal ini ditunjukkan data yang

ada dari 19.225 pasangan usia subur, hanya sebanyak 14.367 pasangan usia subur terdaftar pada program terkait Keluarga Berencana. Pasangan usia subur tersebut tersebar di 13 Desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan. Kemudian dari 13 Desa tersebut dibagi menjadi 3 kategori menurut jumlah peserta KB yang ada pada setiap Desa di Kecamatan Mertoyudan. Masing-masing kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah diambil 2 desa yang mewakili masing-masing kategori jumlah peserta KB. Kategori tinggi di wakili oleh Desa Mertoyudan dan Desa Kalinegoro. Kategori sedang diwakili oleh Desa Jogonegoro dan Desa Sumberejo. Kategori rendah diwakili oleh Desa Donorejo dan Bulurejo. Masing-masing desa tersebut dipilih karena jumlah peserta aktif KB dan pasangan usia subur memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada setiap kategorinya. Pada kenyataan ini dapat dikatakan bahwa kesadaran dan partisipasi penduduk setiap desa di Kecamatan Mertoyudan terhadap pelaksanaan KB masih rendah. Tingkat pendidikan para PUS di Kecamatan Mertoyudan cukup variatif dari tingkat pendidikan SD dan tingkat pendidikan SMP, tingkat pendidikan SMA dan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Selain itu juga di dasarkan pada status sosial, status sosial yang dikenal dan dihormati oleh masyarakat cenderung akan melakukan kegiatan Keluarga Berencana dan memiliki tingkat pengetahuan lebih luas jika dibandingkan dengan status sosial tidak dikenal dan dihormati. Berkaitan uraian yang sudah dijabarkan diatas, peneliti memiliki ketertarikan dan ingin mengadakan penelitian terkait dengan uraian di atas dengan judul; “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Status Sosial Dalam Partisipasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut

- 1.2.1 Apakah tingkat pendidikan PUS berhubungan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?
- 1.2.2 Apakah status sosial PUS berhubungan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?
- 1.2.3 Apakah partisipasi PUS berhubungan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?
- 1.2.4 Adakah hubungan tingkat pendidikan dan status sosial dalam partisipasi PUS pada pelaksanaan keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui tingkat pendidikan PUS pada pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
- 1.3.2 Mengetahui status sosial PUS pada pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
- 1.3.3 Mengetahui partisipasi PUS pada pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

1.3.4 Menguji hubungan antara tingkat pendidikan dan status sosial dalam partisipasi PUS dalam keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Memberikan acuan tentang tingkat pendidikan dan status sosial dengan partisipasi PUS dalam keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

1.4.2 Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pendidikan dan status sosial dengan partisipasi PUS dalam keluarga berencana di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah untuk menggambarkan penelitian ini dan menghindari kesalahan dalam penafsiran. Penegasan istilah dalam hal ini yaitu.

1.5.1 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 2009 tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang ditempuh kepala keluarga dan istrinya. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang berjenjang, berstruktur dan berkesinambungan, sampai dengan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat dilihat dari lamanya tahun pendidikan yang ditempuh oleh pasangan usia subur di Desa Kalinegoro yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan PUS di Desa Kalinegoro

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan
1	1-6	Tamatan SD
2	7-9	Tamatan SMP
3	10-12	Tamatan SMA
4	>12	Tamatan Perguruan Tinggi

1.5.2 Status sosial

Kedudukan yang melekat dalam diri kepala keluarga sebagai anggota masyarakat dipandang secara objektif dari masyarakat lain yang bersangkutan yang sebanding dengan usaha untuk mencapainya..

1.5.3 Partisipasi

Partisipasi menurut Sastrodipoetro (Rohman Ainur. 2009: 45) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok atau kepentingan bersama. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti KB di Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Bentuk partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program KB dapat dilihat sebagai berikut.

1.5.3.1 Peserta KB aktif yang dimaksud yaitu keikutsertaan PUS dalam suatu perkumpulan, kesiapan menjadi kader, dan bersedianya mengeluarkan uang untuk kegiatan KB.

1.5.3.2 Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS.

1.5.3.3 Berhenti menggunakan alat kontrasepsi.

Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu alasan PUS berhenti dalam menggunakan alat kontrasepsi.

1.5.3.4 Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Depkes RI (2004) merupakan pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama baik bertempat tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana umur istrinya antara 15 – 49 tahun. PUS dalam penelitian ini yaitu PUS yang tinggal di Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan mengikuti program Keluarga Berencana dengan jumlah 1.541 jiwa (BPS Kabupaten Magelang, 2019).

1.5.3.5 Program Keluarga Berencana

Menurut Dyah Novianti dan Sujiyatini (2011: 28) pengertian program Keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bagian kajian pustaka akan dijabarkan tentang kajian teori yang berisi tentang definisi dan konsep mengenai teori yang digunakan. Selain kajian teori, ada kajian empiris yang berisi tentang penelitian-penelitian lain yang mendukung. Terakhir, penjelasan mengenai kerangka berpikir.

2.1 Partisipasi

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Mardikanto (2003), mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Soetomo (2006), menginventarisasi adanya 6 tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi, yaitu:

2.1.1.1 Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.

2.1.1.3 Partisipasi adalah kemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

2.1.1.4 Partisipasi adalah proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

2.1.1.5 Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

2.1.1.6 Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

2.1.2 Metode Partisipasi

Notoatmodjo (2007), mengatakan metode partisipasi masyarakat adalah :

2.1.2.1 Partisipasi dengan paksaan (*Enforcement participation*)

Artinya memaksa masyarakat untuk berkontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasilnya dan mudah. Masyarakat akan takut, merasa dipaksa dan kaget, karena dasarnya bukan kesadaran (*awareness*), tetapi ketakutan. Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program.

2.1.2.2 Partisipasi dengan persuasi dan edukasi.

Yakni suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan mempunyai rasa memiliki dan rasa memelihara. Partisipasi ini dimulai dengan penerangan, pendidikan, dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun bentuk – bentuk partisipasi antara lain: a)Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan, b)Penerimaan manfaat

secara merata, c) Pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pembangunan sosial dan ekonomi.

Mengacu pada pandangan ini, partisipasi dibedakan menjadi dua hal, *authentic participation* (*partisipasi otentik*) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Jika seluruh kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini akan disebut *pseudo participation* (partisipasi semu) (Rohman, 2009).

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Plumer dalam (Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

2.1.3.1 Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahamsi ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2.1.3.2 Pekerjaan masyarakat

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

2.1.3.3 Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

2.1.3.4 Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

2.1.3.5 Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Secara umum faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan faktor yang berasal dari luar. Faktor yang berasal dari dalam yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor ini dapat berupa sikap, pengetahuan atau partisipasi dari individu itu sendiri untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Faktor yang berasal dari luar yaitu faktor yang datang dari luar diri seseorang, dapat dari lingkungan atau orang lain. Faktor ini dapat berupa paksaan, anjuran, ataupun penyuluhan (Mardikanto, 2003: 6).

2.1.4 Unsur-unsur Pokok Partisipasi

Mardikanto (2003: 26) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

2.1.4.1 Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak lain). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang sebagai berikut: 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya, 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.

2.1.4.2 Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, kesempatan untuk memperoleh informasi, dan kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.

2.1.4.3 Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik antara lain kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemampuan untuk memahami kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber yang tersedia dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

Partisipasi PUS dalam penelitian yang dimaksud adalah keikutsertaan PUS, ikut pelaksanaan KB, dan berpartisipasi dalam bentuk dana. Bentuk

indikator partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program KB dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Peserta KB aktif yang dimaksud yaitu keikutsertaan PUS dalam suatu perkumpulan, kesiapan menjadi kader, dan bersedianya mengeluarkan uang untuk kegiatan KB.
- b. Alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS.
- c. Berhenti menggunakan alat kontrasepsi. Sub indikator yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu alasan PUS berhenti dalam menggunakan alat kontrasepsi

2.1.5 Bentuk-bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Bentuk- Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul (2013) karya Nuring Septyasa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

2.1.5.1 Partisipasi pikiran

Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat.

2.1.5.2 Partisipasi tenaga

Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga.

2.1.5.3 Partisipasi harta

Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

2.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terdiri dari pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, jalur pendidikan, dan jenjang pendidikan sebagai berikut.

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara”.

2.2.2 Tujuan Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini berarti adanya kewajiban belajar yang memberi kesempatan dan mengharuskan belajar kepada setiap anak hingga usia tertentu (sekurang-kurangnya usia 13 tahun) dan pada pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan serta harkat martabat bangsa, mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkualitas, sehingga membangun dirinya dan masyarakat di sekelilingnya serta memenuhi kebutuhan pembangunan kesejahteraan bangsa agar mampu hidup sejahtera (Ihsan, 2005: 10).

2.2.3 Jalur Pendidikan

Menurut Ihsan (dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan, 2005:16) jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Philip H. Cooms mengkalsifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian yaitu pendidikan formal (pendidikan sekolah), pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan), dan pendidikan non-formal (pendidikan luar sekolah yang dilembagakan). Pendidikan luar sekolah yang tidak

dilembagakan. Pendidikan informal Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, pasar atau pergaulan sehari-hari. Pengaruhnya pendidikan luar sekolah sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat pendidikan luar sekolah tidak dilembagakan berperan penting melalui keluarga dan masyarakat.

2.2.3.1 Pendidikan Sekolah/Pendidikan Formal

Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Yusuf, 2014).

2.2.3.2 Pendidikan Luar Sekolah yang dilembagakan

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana diluar kegiatan persekolah serta pendekatannya lebih fleksibel (Sutarto, 2017). Calon peserta pendidikan luar sekolah sebagai berikut, a)Penduduk usia sekolah yang tidak pernah mendapatkan keuntungan/ kesempatan memasuki sekolah, b)Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah, c)Peserta didik yang putus sekolah, d)Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan namun tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, e)Orang yang telah bekerja, tetapi ingin menambah keterampilan lain (Fuad Ihsan, 2005: 18). an. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis,

2.2.4 Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan, 2005:22). Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, memiliki pengertian sebagai berikut.

2.2.4.1 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Fuad Ihsan, 2005:22).

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh semua warga (Mulyono, 2013). Dengan kata lain, warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar yang dapat membekali dirinya dengan pengetahuan dasar, nilai dan sikap dasar, serta keterampilan dasar. Pendidikan dasar wajib dilaksanakan selama 9 tahun oleh semua warga Indonesia.

2.2.4.2 Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial dan budaya serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau perguruan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan (Fuad Ihsan, 2005:23).

2.2.4.3 Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (Fuad Ihsan, 2005:23).

Pendidikan bagi pasangan usia subur merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan program keluarga berencana guna membangun keluarga yang sejahtera (Sutarto, 2007). Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik maka dapat menerima segala informasi dari luar, memahami serta melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pembangunan keluarga sejahtera (BKKBN, 2001). Kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat dilihat dari lamanya tahun pendidikan yang ditempuh oleh pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan yaitu sebagai berikut.

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan perubahan status, sikap, maupun pandangan hidup masyarakat (Attane, 2002). Pendidikan wanita mempunyai arti tersendiri dalam hubungannya dengan fertilitas. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan wanita juga berpengaruh kepada kegiatan ekonomi. Wanita dengan pendidikan tinggi cenderung akan melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah daripada wanita yang berpendidikan rendah (BKKBN, 2004). Definisi Pendidikan

dalam penelitian ini adalah tingkatan pendidikan yang sudah di capai oleh manusia dalam jalur pendidikan formal.

2.3 Status Sosial

Menurut Hendropuspito (1989 : 103) istilah status berasal dari bahasa latin “*stare*” yang berarti berdiri. Selanjutnya pengertian status disamakan dengan istilah “kedudukan”. Jadi status seseorang adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain atau masyarakat di sekelilingnya dimana ia tinggal dan disitulah ia bergantung pada orang-orang disekitarnya.

Astrid. S. Susanto (1999 : 75) mengartikan status sebagai “Kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya.” Sehingga status merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tersebut. Hal yang senada diungkapkan M. Rusli Karin (1990 : 97) yang mengartikan status sebagai kedudukan sosial adalah “Tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya.” Pengertian ini menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengukur tinggi rendahnya status seseorang harus dilihat dari masyarakat umum dimana ia tinggal, karena status tidak bisa lepas dari orang lain. Menurut Paul B Horton (1999 : 5) ” Status sosial atau kelas sosial dapat di definisikan sebagai suatu strata (lapisan) orang-

orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaian kesatuan)".

Sedangkan menurut Soejono Soekanto status sosial diartikan sebagai berikut:

"Status sosial diartikan sama dengan kedudukan sosial, status artinya sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya dalam kelompok tersebut. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestise, dan hak-hak istimewa serta kewajibannya".

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kadang kita tidak menyadari akan ada perbedaan status sosial secara otomatis yang terjadi dalam masyarakat dimana masyarakat secara otomatis akan menenpatkan seseorang pada kedudukan tertentu berdasarkan hal-hal yang dihargai dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan mereka juga akan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukan/statusnya tersebut.

Dalam masyarakat kedudukan seseorang bisa disebabkan dari beberapa hal. Tergantung bagaimana kebudayaan setempat. Namun secara umum kedudukan sosial atau status sosial dapat dilihat dari kekayaan, ekonomi, pendidikan dan keturunan.

2.3.1 Macam-macam Status Sosial

Soerjono Soekanto (2002 : 240) membedakan status menjadi tiga yaitu:

2.3.1.1 Ascribed Status.

Yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan kedudukan tersebut. Status ini sering dijumpai dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi tertutup (feodal).

2.3.1.2 Achieved status.

Yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha -usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka pada siapa saja tergantung dari kemampuan masing – masing orang dalam mengejar serta mencapai tujuan – tujuannya.

2.3.1.3 Assigned Status.

Yaitu status yang didapatkan seseorang karena telah berjasa dalam bidang tertentu atau telah memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat.

Dalam mendapatkan status sosial ini tidak menutup kemungkinan satu orang akan memiliki beberapa kedudukan sekaligus bahkan bisa jadi ketiga status tersebut melekat pada seseorang secara bersamaan. Tapi biasanya masyarakat hanya akan melihat kedudukan utama yang menonjol saja. Kedudukan yang melekat pada seseorang dapat terlihat dari kehidupan sehari – harinya melalui ciri – ciri tertentu yang dalam sosiologi dinamakan prestise symbol (status – symbol).

2.3.2 Pembagian Kelas Sosial

Warner dalam Poul B Horton (1999 : 6) membagi kelas sosial didalam masyarakat menjadi 6 kelas antara lain:

2.3.2.1 Kelas sosial atas- lapisan atas (Upper-Upper class).

Mencakup keluarga keluarga kaya lama, yang telah lama berpengaruh dimasyarakat dan mempunyai kekayaan yang begitu lama, sehingga orang-orang tidak lagi bisa mengingat kapan keluarga itu memperoleh kekayaan.

2.3.2.2 Kelas sosial atas-lapisan bawah (lower – upper class).

Mungkin saja memiliki jumlah uang yang sama dengan kelas atas, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya. Dan keluarga mereka berpengaruh dalam masyarakat.

2.3.2.3 Kelas sosial menengah lapisan atas (Upper – middle class).

Mencakup para pengusaha dan orang-orang profesional yang berhasil, yang umumnya memiliki latar belakang keluarga 'baik' dengan penghasilan yang menyenangkan.

2.3.2.4 Kelas Sosial menengah - lapisan bawah (Lower – middle class).

Meliputi para juru tulis, pegawai kantor, dan orang-orang semi profesional serta mungkin pula termasuk beberapa penyelia (supervisor) dan pengrajin terkemuka.

2.3.2.5 Kelas sosial rendah lapisan atas (upper-middle class).

Terdiri atas sebagian besar pekerja tetap yang sering disebut sebagai golongan pekerja oleh orang-orang yang kurang senang menggunakan istilah "kelas sosial rendah" bagi para pekerja yang bertanggung jawab.

2.3.2.6 Kelas sosial rendah-lapisan bawah (lower-lower class).

Meliputi para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman dan orang-orang yang hampir terus menerus tergantung pada tunjangan pengangguran.

Dari uraian tentang klasifikasi status sosial di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang mendapatkan status sosial ada dua macam yaitu status yang didapatkan seseorang secara otomatis sejak dia lahir karena dari keturunannya tanpa dia harus mengusahakannya atau berkorban terlebih dahulu

misalnya keturunan darah biru, bangsawan, harta kekayaan. Dan status yang kedua adalah status sosial yang didapatkan seseorang karena usaha atau pengorbanannya untuk mendapatkan status tersebut misalnya gelar doktor, sarjana.

2.3.3 Aspek Status Sosial

Abu Ahmad (1985 : 80) mengemukakan bahwa status seseorang mempunyai dua aspek yaitu ;

2.3.3.1 Aspek fungsional yang juga disebut social role atau peranan sosial yang terdiri dari kewajiban – kewajiban dan keharusan – keharusan karena kedudukannya dalam sistem tertentu.

2.3.3.2 Aspek yang struktural yaitu status yang ditunjukkan oleh adanya hierarki atau susunan lapisan sosiologi dari atas ke bawah, aspek ini sifatnya lebih stabil dibanding aspek fungsional.

Dalam masyarakat ditemui perbedaan-perbedaan status sosial setiap orang.ada yang berkedudukan tinggi ada pula yang berkedudukan rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh: (a) Pangkat/jabatan, pangkat atau jabatan merupakan gelar yang didapatkan seseorang sesuai dengan usahanya berkaitan dengan pekerjaan. Seorang pemangku jabatan akan memiliki peranan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai jabatan apapun dalam masyarakat.(b) Prestise pekerjaan, pekerjaan merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang disuatu tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan merupakan determinasi kelas sosial setelah penghasilan . Seseorang dalam memilih pekerjaan akan selalu memilih pekerjaan

yang dianggapnya bagus karena suatu pekerjaan akan memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Oleh karena itu kedudukan seseorang dapat diketahui dari jenis pekerjaannya. Dengan melihat jenis pekerjaan seseorang kita bisa tahu apakah orang tersebut berstatus sosial rendah atau tinggi. Sehingga orang akan berlomba lomba untuk mencari pekerjaan yang memiliki nilai status tinggi. (c) Keturunan, orang yang dilahirkan dalam keluarga bangsawan secara otomatis akan mewarisi darah biru dari nenek moyangnya. Oleh karena itu anak seorang raja yang baru lahir akan langsung mendapat gelar sebagai putri mahkota atau putra mahkota atau pangeran. (d) Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan seseorang akan dihargai sebagai penentu status sosial seseorang dalam masyarakat.

Kedudukan seseorang dalam masyarakat akan mempengaruhi kegiatan dalam memenuhi hidupnya dan kedudukan ini mempengaruhi seseorang untuk menuntut ilmu. Adapun peranan status sosial dalam masyarakat menurut Suryani (1990 : 34) adalah "Dengan adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat memberikan kesempatan atau fasilitas hidup yang berbeda bagi masyarakat seperti: keselamatan hidup, harta benda, standar hidup, kebebasan dan tingkah laku" Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa status seseorang akan berpengaruh pada peranan mereka yang berbeda dalam masyarakat dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki status yang berbeda pula.

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel status sosial adalah skala lima seperti skala likert yang dimodifikasi. Berdasarkan uraian tentang status sosial secara keseluruhan dapat dibuat indikator-indikator dari status sosial kepala

keluarga. Indikator-indikator ini akan dijabarkan ke dalam item-item. Setiap item diberi bobot yang sama. Dengan demikian indikator variabel status sosial kepala keluarga akan diukur dengan: 1) Dikenal oleh masyarakat luas, yang meliputi: Intensitas undangan untuk menghadiri keperluan pribadi, banyaknya masyarakat yang mengenal, diundang dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, jumlah kehadiran orang yang diundang dalam acara pribadinya. 2) Dihormati oleh masyarakat, yang meliputi: Suaranya diperhitungkan oleh masyarakat, penerimaan masyarakat akan kehadirannya, kehilangan masyarakat ketika dia tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan, intensitas permintaan masyarakat untuk memintanya berbicara didepan umum, kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya pribadinya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud status sosial adalah kedudukan yang melekat dalam diri kepala keluarga sebagai anggota masyarakat dipandang secara objektif dari masyarakat lain yang bersangkutan yang sebanding dengan usaha untuk mencapainya.

2.4 Keluarga Bencana

Penjelasan keluarga berencana dalam penelitian ini terdiri dari pengertian keluarga berencana (KB), organisasi KB di Indonesia, tujuan program KB, sasaran program KB, dan praktek pelayanan program KB sebagai berikut.

2.4.1 Pengertian Keluarga Berencana

Pengertian Keluarga Berencana menurut UU No. 2 Tahun 1992 (tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan

usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.” Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Depkes,1999).

Perluasan dan pengembangan Program Keluarga Berencana Nasional secara bertahap dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (Tambunan, 2014). Keberhasilan program ini dapat dicapai dengan komitmen politis yang tinggi dari pemerintah dan keuletan secara kesungguhan para unit pelaksana, partisipasi, dan instiusi masyarakat serta anggota masyarakat (Sutinah, 2017). Kebijakan, hukum, dan program pemerintah sangat mempengaruhi metode-metode yang telah tersedia dan cara pelayanannya. Program menyediakan kontrasepsi modern yang di dukung oleh kebijakan dan persetujuan pemerintah, serta pendidikan yang dikombinasi dengan keadaan sosial yang kondusif merupakan program yang paling efektif untuk menurunkan fertilitas (Maudlin dan Ross,1991) dalam dasa warsa terakhir, sedikitnya 50 negara telah secara resmi mengumumkan kebijakan atau hukum yang mendukung Keluarga Berencana untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, mencapai tujuan pembangunan nasional, mendukung hak setiap orang untuk menentukan ukuran keluarga menjamin pemerataan penyediaan pelayanan (BKKBN, 2011).

2.4.2 Ruang Lingkup Program KB

Program keluarga berencana adalah upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera (Undang-undang No. 10/1992). Keluarga Berencana (*Family Planning, Planned Parenthood*) merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Puspaningtyas, 2014). Selain alat kontrasepsi program KB lainnya meliputi komunikasi informasi dan edukasi, pendidikan sex, konsultasi pra perkawinan sebagai berikut.

2.4.2.1 Komunikasi Informasi dan Edukasi

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Darmawati, 2012) adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan maksud terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru (Handayani, 2010: 15).

2.4.2.2 Pendidikan Sex

Pendidikan seks (Kusmindari, 2016) adalah salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya untuk mencegah dampak negatif yang tidak diharapkan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, depresi dan perasaan berdosa. Pendidikan seks tidak terbatas pada perilaku hubungan seks semata tetapi menyangkut hal-hal lain, seperti peran pria dan wanita dalam masyarakat, hubungan pria dan wanita dalam pergaulan, peran ayah-ibu, dan anak-anak dalam

keluarga (Hartanto, 2004 :45). Pendidikan seks untuk anak usia dini berbeda dengan pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks untuk remaja lebih pada seputar gambaran biologi mengenai seks dan organ reproduksi, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi serta penyakit menular seksual, sedangkan pada anak usia dini lebih pada pengenalan peran jenis kelamin dan pengenalan anatomi tubuh secara sederhana. Orangtua sebaiknya memberikan penjelasan sesuai dengan usianya (Anggaunitakiranantika, 2013). Apabila anak berusia kurang dari 6 tahun, berikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Bekali anak dengan pengetahuan seksual yang benar, jangan biarkan anak melihat ketelanjangan orangtuanya. Jauhkan anak dari kekerasan pada daerah sensitif di tubuhnya yang kemungkinan nantinya akan menimbulkan kenikmatan seksual dan yang terakhir, sebaiknya anak-anak sejak dini perlu diajarkan menghargai tubuhnya sebagai barang berharga sehingga dapat menjauhkannya dari pelecehan seksual (Handayani, 2010: 28).

2.4.2.3 Konsultasi Pra Perkawinan Dan Konsultasi Perkawinan.

Pengertian konsultasi pra perkawinan adalah proses bimbingan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan sebagai bekal dalam menjalankan pernikahan. Unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan pra nikah, objek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah. Konsultasi pra nikah membahas tentang interaksi pernikahan, manajemen keuangan, dimensi keagamaan dan tugas orang tua(Syafudin, 2009: 56).

Konsultasi perkawinan adalah proses bimbingan kepada pasangan suami-istri yang mempunyai permasalahan dalam menjalankan pernikahan (Febriansyah, 2015). Konsultasi pernikahan terjadi apabila ada permasalahan di dalam rumah tangga. Konsultasi pra nikah membahas tentang konsultasi keluarga sakinah, konsultasi keluarga sejahtera dan konsultasi kesehatan reproduksi dan ibu hamil (Handayani, 2008: 60).

2.4.3 Organisasi KB di Indonesia

2.4.3.1 PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

PKBI merupakan salah satu LSM yang menjadi pelopor Keluarga Berencana dan berkomitmen meningkatkan status kesehatan reproduksi rakyat Indonesia (Wilopo, 1997). PKBI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung IDI Jln. Dr. Sam Ratulangi 29 Jakarta, yang melibatkan tokoh pendiri antara lain seperti: DR. Soeharto, Ny. Nani Soewondo SH, Ny. Roem, Dr. M. Judono, dkk. Pada tahun 1970 PKBI menjadi unit pelaksana program KB nasional yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 18).

Misi yang dimiliki oleh PKBI yaitu memperjuangkan penerimaan dan praktek keluarga bertanggung jawab dalam keluarga Indonesia melalui pengembangan program, pengembangan jaringan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum dan secara khusus di bidang kesehatan reproduksi (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 19).

2.4.3.2 BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

Keputusan Presiden No.20 Tahun 2000 mengatur tentang BKKBN. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BKKBN dipimpin oleh seorang kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas BKKBN adalah merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat (BKKBN: 2011).

2.4.3.3 BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 (Novianti, 2014), berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN, 2011). Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (Biroli, 2015). Untuk mencapai visi dan misi tersebut BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan

kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2) (BKKBN, 2011).

2.4.4 Tujuan Program KB

Secara umum tujuan 5 tahun ke depan (Ernawati, 2016) yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi program KB di muka adalah membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program KB Nasional yang kuat di masa mendatang, sehingga visi untuk mewujudkan keluarga berkualitas 2015 dapat tercapai. Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat/ angka kematian ibu bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas sedangkan tujuan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya, untuk mempersiapkan kehidupan dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 28).

2.4.5 Sasaran Program KB

Sasaran program KB dalam lima tahun ke depan seperti tercantum dalam RPJM 2004-2009 sebagai berikut.

2.4.5.1 Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara nasional menjadi 1,14 % per tahun.

2.4.5.2 Menurunkan angka kelahiran menjadi 2,2 per perempuan

2.4.5.3 Meningkatkan peserta KB pria menjadi 4,5 %

2.4.5.4 Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien

2.4.5.5 Meningkatnya jumlah partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.

2.4.5.6 Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Hasil yang didapatkan dari sasaran program KB RPJM 2004-2009 sebagai berikut.

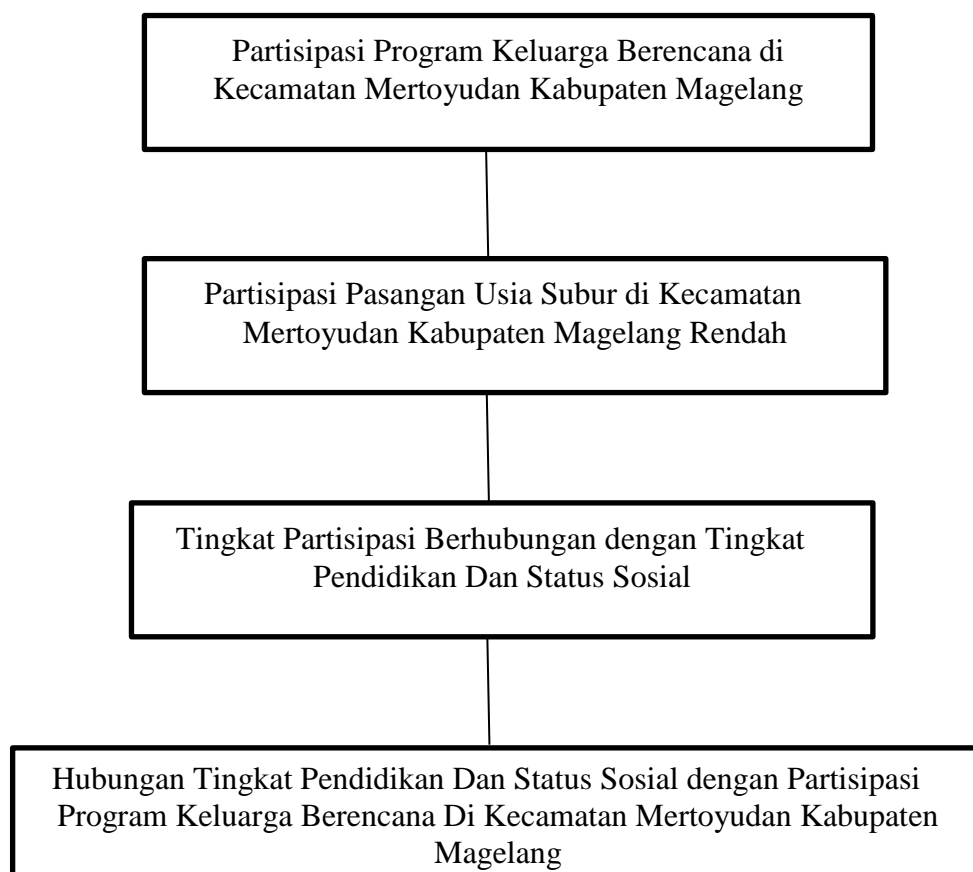
- a. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.072.473 akseptor
- b. Terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.098.188 akseptor atau 71.87 % dari Pasangan Usia Subur sebanyak 7.093.654.
- c. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita menjadi 18,2 tahun (Dyah dan Sujiyatini, 2011: 31).

Keluarga berencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status partisipasi pasangan usia subur dalam melakukan keluarga berencana.

2.5 Kerangka Berpikir

Keluarga Berencana menurut UU No. 2 Tahun 1992 (tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan

usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera”. Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat/ angka kematian ibu bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program keluarga berencana diharapkan program KB akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Partisipasi pasangan usia subur juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan dan status sosial yang dimiliki oleh pasangan usia subur tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesa Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2006:96). Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₀ : Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan status sosial dengan tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

H_a : Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan status sosial dengan tingkat partisipasi PUS dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

5.1.1 Tingkat pendidikan PUS Kecamatan Mertoyudan secara umum rendah yaitu dengan rata-rata tamatan sekolah menengah pertama. Pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan kebanyakan lebih memilih kerja ketimbang melanjutkan sekolah. Padahal tingkat pendidikan menentukan kepribadian seseorang dalam segi sosial, ekonomi ataupun budaya demi perkembangan pribadi sebagai individu ataupun anggota masyarakat.

5.1.2 Status sosial PUS di Kecamatan Mertoyudan secara umum tergolong sedang. Pasangan usia subur di Kecamatan Mertoyudan sebagian besar bekerja sebagai buruh sehingga pendapatan yang dimiliki tidak terlalu tinggi dan rata-rata istrinya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mempunyai pendapatan tambahan yang lainnya. Perbedaan status sosial juga dipengaruhi oleh pendidikan dan tingkat ekonomi yang mereka miliki.

5.1.3 Partisipasi PUS pada realisasi program KB di Kecamatan Mertoyudan secara umum sangat rendah. Partisipasi PUS adalah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program keluarga berencana. Partisipasi PUS terbilang rendah akibat tidak meratanya informasi terkait keluarga berencana dan banyak pasangan usia subur yang masih ingin menambah jumlah anak.

5.1.4 Tingkat taraf pendidikan dan status sosial mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Tingkat pendidikan seseorang dapat membawa pola berpikir seseorang terutama pada aspirasinya terhadap pendidikan itu sendiri. Perbedaan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, tidak terkecuali keikutsertaan keluarga berencana. Pendapatan yang dimiliki pasangan usia subur berpengaruh terhadap partisipasi program keluarga berencana. Status sosial yang rendah berpengaruh terhadap keikutsertaan pasangan usia subur dalam program keluarga berencana karena status sosial yang rendah cenderung berasal dari tingkat ekonomi yang rendah juga sehingga untuk membeli atau memasang alat kontrasepsi memerlukan uang yang banyak, sedangkan uang yang mereka punya hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5.2 Saran

Saran dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian dapat dituliskan berikut :

5.2.1 Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Magelang untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang manfaat program KB khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat taraf pendidikan yang tidak tinggi dan status sosial yang tidak tinggi sehingga lebih efektif untuk menggiatkan tingkat keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam berpartisipasi pada Program Keluarga Bencana.

5.2.2 Bagi PLKB untuk lebih giat melakukan penyuluhan dan pendampingan pada keluarga-keluarga yang memiliki tingkat taraf pendidikan tidak tinggi serta

status sosial yang tidak tinggi untuk lebih menggiatkan keikutsertaan KB sehingga tingkat keberhasilan program KB lebih meningkat lagi.

5.2.3 Bagi Pasangan Usia Subur seharusnya lebih peduli terhadap pendidikan yang dimiliki dan lebih meningkatkan partisipasinya dalam program KB. Peningkatan partisipasi dapat membantu pemerintah dalam programnya untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk yang dimiliki Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prabowo. 2011. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Pria Tentang Keluarga Berencana Dengan Perilaku Pria Dalam Berpartisipasi Menggunakan Metode Kontrasepsi Keluarga Berencana Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. *Jurnal Gaster*, 8(1):633-642.
- Alfan Biroli. 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi Fenomenologi Terhadap Masyarakat Di Dusun Karanggawang, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang). *Dimensi Journal of Sociology*. 8(1): 1-12.
- Ali, Muh. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Anggaunitakiranantika. 2013. Pola Pengambilan Keputusan Mengenai Partisipasi Dalam Program Keluarga Berencana Pada Keluarga Muda Di Kota Malang. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*. 7(1): 61-78.
- Anita Rahmawati & Edy Mulyono. 2018. Pengaruh Pelayanan Penyuluh Lapangan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana. *JNE 2 (2) (2017)*. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne>. Semarang : Unnes. (diunduh 16 September 2019).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariyani, N., & Yusuf, A. (2014). Peranan kader kesehatan dalam pembinaan wanita pekerja seks (WPS) di Lokalisasi Sunan Kuning. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2), 30–40.
- Attane, I. 2002. China's family planning policy: An overview of its past and future. *Studies in Family Planning* 33, no. 1: 103–113.
- Aziz R, Abdul. 1988. *Pengantar Kependudukan*. Jakarta: FKIP Universitas Haluoleo.
- BKKBN. 1981. *Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2001. *Informasi Dasar Gerakan KB Nasional*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2011. *Sejarah Keluarga Berencana*. Artikel. Jakarta: BKKBN.

- Blanc, A. K, and A. O Tsui. 2005. The dilemma of past success: Insiders' views on the future of the international family planning movement. *Studies in Family Planning* 36, no. 4: 263–276.
- BPS. 2006. Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2006. Jakarta: BPS.
- Chapagain, M. (2006). Conjugal power relations and couples' participation in reproductive health decision-making: Exploring the links in Nepal. *Gender Technology and Development*, 10 (2), 159-189.
- Darmawati. 2012. Pengaruh Efektifitas Konseling Terhadap Dukungan Suami Dalam Pengambilan Keputusan Kb Dan Pemilihan Kontrasepsi. *Idea Nursing Journal*. 3(2):1-11.
- Depkes RI. 1999. Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Desi Kusmindari. 2016. Peran Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Journal National Family Planning and Population*, 1(1): 14-21.
- Desmaiita. 2009. Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Priasebagai Peserta Kb Dikelurahan Tembilihan Kota Tahun 2008. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 3(2): 77-82.
- Devita, Mia. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pasangan Usia Subur dala Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pucukwangi Kabupaten Pati. Skripsi. Semarang: UNNES.
- Diah Gayatri & Tri Joko Raharjo. 2017. Pengaruh Karakteristik Ibu terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur. *JNFC* 1 (1) (2017). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>. Semarang : Unnes. (diunduh 16 September 2019).
- Ding, Q. J, and T. Hesketh. 2006. Family size, fertility preferences, and sex ratio in China in the era of the one child family policy: results from national family planning and reproductive health survey. *BMJ* 333, no. 7564: 371.
- Ditta Tourisia. 2015. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Partisipasi Suami Dalam BerKB. *Jurnal Involusi Kebidanan*. 5(9): 50-64.
- Dyah dan Sudjianti. 2009. Panduan Lengkap Pelaksanaan KB. Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Ermy Nurhayati , Joko Sutarto, Sungkowo Edy Mulyono. 2018. Motivation as Mediation Variable in the Effect of Knowledge Level and Socioeconomic

- Status to Participation of PUS (Couples of Reproductive Age). *UJME 6 (2)* (2017). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/13571>. Semarang : Unnes. (diunduh 16 September 2019).
- Fauyan, Achmad. 2011. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KB Di Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Skripsi. Semarang: UNNES.
- Handayani, Sri. 2010. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Hardati, Puji, dkk. 2010. Pengantar Ilmu Sosial. Semarang: UNNES.
- Hartanto, Hanafi. 2004. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ihsan, Fuad. 2005. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Keputusan Gubernur. 2014. Upah Minimum. Jawa Tengah: Gubernur Jawa Tengah.
- Kuswati, Dkk. 2007. Kependudukan dan KB. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lina Astuty dan Therecia Widjayati. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Suami Dalam Menggunakan Alat Kontrasepsi. *Jurnal Vokasi Kesehatan*. 2(1): 24-28.
- Mantra Ida Bagoes. 2004. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Montgomery, M. R, and J. B Casterline. 1993. The diffusion of fertility control in Taiwan: Evidence from pooled cross-section timeseries models. *Population Studies* 47, no. 3: 457-479.
- Muhammad Febriansyah. 2015. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara* 3(3): 873-884.
- Mulyono, E., S. 2013. Sosiologi Pembangunan dan Pendidikan. Semarang : Unnes Press.
- Mulyono, E., S. 2017. Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Ombak Tiga.
- Munib, dkk. 2010. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 UNNES.

- Niken Septihandini Puspaningtyas, Hardi Warsono, Aufarul Marom. 2014. Artispasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan. *Journal Of Public Policy And Management Review*. 3(1): 1-9.
- Novianti S, Gustaman RA. 2014. Faktor Persepsi dan Dukungan Istri yang Berhubungan Dengan Partisipasi KB Pria. *Journal Kesehatan Komunitas Indonesia*. 2(10):1017-2027.
- Nung Ati Nurhayat. 2013. Ketentuan Tentang Keluarga Berencana Dan Asas Non diskriminasi Dikaitkan Dengan Hak Reproduksi Perempuan. *Jurnal Ilmu Keperawatan*. 4(3):25-34.
- Pidarta, Made. 2009. *Landasan Kependidikan: stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Puri Kusuma Dwi Putri. 2012. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap dan Terpaan Iklan Layanan Masyarakat KB Versi Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu di TV terhadap Perilaku KB pada Wanita atau Pria dalam Usia Subur. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1):46-56.
- Putri. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap dan Terpaan Iklan Layanan Masyarakat KB Versi Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu di TV terhadap Perilaku KB pada Wanita atau Pria dalam Usia Subur. *Makasar: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS Makasar*.
- Rafika Nur Camelia. 2015. Perbedaan Tingkat Partisipasi Sebagai Akseptor Keluarga Berencana Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 4(1):68-72.
- Sayuti, Jamil. 1989. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Proyek Perkembangan Penelitian.
- Siswanto Agus Wilopo. 1997. Arah Dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Indonesia. *Journal Populasi*, 8(1) : 63-67.
- Sugiyono. 2009. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: PT Alfabet.
- Supratikno, G., Wirth, M. E., & Achadi, E. (2002). A district-based audit of the causes and circumstances of maternal deaths in South Kalimantan, Indonesia. *Bulletin of World Health Organization*, 80 (3), 228-235.
- Susi Ernawati. 2016. Faktor yang Memengaruhi Keluarga Berencana (KB) Pria dengan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Wilayah Kerja

- Puskesmas Sedayu II. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. 4(2): 109-116.
- Sutarto, Joko, Rasdi Ekosiswoyo dan Ahmad Rifai RC. (2017). *Pendidikan Nonformal Teori Dan Program*. Semarang: Widya Karya.
- Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Non Formal (Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES PRES.
- Sutinah. 2017. Partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di era masyarakat postmodern. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 30, No. 3, tahun 2017, hal. 289-299.
- Syafudin. Abdul Bari. 2009. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Tambunan, H. 2014. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana (Penelitian di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul). *Jurnal Dimensia*, 2 (1):77-85.
- Tri Joko Raharjo. 2005. *Model Pengembangan Tenaga Kependidikan Tutor Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C*. Semarang : Unnes Press.
- Withers, M., Kano, M., & Pinatih, G. N. I. 2010. Desire for more children, contraceptive use and unmet need for family planning in a remote area of Bali, Indonesia. *Journal of biosocial science*, 42(4), 549-562.
- Yusuf, A. (2014). Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 31(2), 83-91.